**BARAKA SEBAGAI BASIS PERTAHANAN DI/TII (1953-1965)**

**Pendahuluan**

Pembacaan teks Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah bukti bahwa Indonesia telah merdeka. Perjuangan tersebut tidak terhenti hanya saja ketika Indonesia telah merdeka. Sukarno selaku Presiden pertama Indonesia pernah mengatakan bahwa perjalanan panjang kita kedepan akan sangat berat, itu dikarenakan yang kita hadapi bukan lagi bangsa luar melainkan bangsa kita sendiri. Banyak bermunculan pemberontakan sebelum dan setelah kemerdekaan Indonesai. Pemberontakan yang terjadi seperti pemberontakan PKI di Madium, Pemberontakan Andi Asis, Pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Aidil), Pemberontakan PRRI/PERMESTA, dan DI/TII (Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia).

Negara Islam Indonesai (NII), Tentara Islam Indonesia (TII) atau biasa disebut dengan Darul Islam (DI) adalah sebuah gerakan politik yang didirikan pada tanggal 7 Agustus 1949 (12 Syawal 1368)oleh politisi muslim yang radikal yaitu Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawilgar, Kawedaan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kartosoewirjo merupakan sekertaris dari partai MIAI yang dirubah menjadi Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) pada Oktober 1947. [[1]](#footnote-2) gerakan ini bertujuan untuk menjadikan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang menerapkan dasar Agama Islam sebagai dasar negara.

Demi menopang NII yang dibentuknya S. M. Kartosoewirjo membentuk sebuah gerakan yang disebut Darul Islam (DI) dan para tentaranya diberi julukan Tentara Islam Indonesia (TII) yang dibentuk pada saat provinsi Jawa Barat ditinggalkan oleh Pasukan Siliwangi yang sedang behijrah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta dalam rangka melaksanakan Perundingan Renville.[[2]](#footnote-3)

Dalam perkembangannya, Negara Islam Indonesia ini menyebar sampai ke beberapa wilayah yang berada di Negara Indonesai. Gerakan ini telah menghasilkan pecahan diberbagai wilayah di Nusantara seperti pemberontakan Amir Patah (Brebes, Tegal) dan Kyai Somolagu (Kebumen) di Jawa Tengah (1950-1959), Pemberontakan Daud Beureueh di Aceh (1953-1962), Pemberontakan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan (1954-1963) dan Pemberontakan Abdul Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan ( 1950-1965). [[3]](#footnote-4)Salah satu pemberontakan yang akan selalu dikenang dalam Sejarah Sulawesi Selatan yaitu pemberontakan DI/TII yang dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakkar. Pemberontakan yang dilatarbelakangi dengan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan pusat. Kekecewaan tersebut membuat ia melakukan pemberontakan yang berlangsung kurang lebih selama 15 tahun.

Sebelum bergabung dengan DI/TII, Abdul Kahar Muzakkar [[4]](#footnote-5)selaku komandan dari Komando Grup Seberang (KGS) dengan pangkat Letnan Kolonel meminta Saleh Syahban untuk menghimpun para kelaskaran Sulawesi Selatan dalam Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS). Pembentukan kesatuan tersebut bertujuan untuk menghimpun semua gerilyawan yang ada di Sulawesi Selatan dalam KGSS. KGSS dibentuk pada Agustus 1949 di Maros[[5]](#footnote-6). KGGS yang berkekuatan 10 batalion diharapkan menjadi cikal bakal Divisi Hasanuddin dengan Kahar Muzakkar sebagai pemimpinnya. [[6]](#footnote-7)

Pada tanggal 1 Juli 1950, atas nama kaum gerilyawan Kahar Muzakkar menemui Kolonel Kawilarang selaku Panglima TT VII/Wirabuana demi menyampaikan permohonan agar 15.000 gerilyawan Sulawesi Selatan diterima menjadi bagian dari Angkaan Perang Republik Indonesia (APRI). Akan tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Panglima TT VII/Wirabuana sehingga dengan emosi Ia menyatakan memutuskan hubungannya dengan TNI.

Akibat dari perbuatan Abdul Kahar Muzakkar, Panglima mengeluarkan suatu dekrit yang menyatakan pembubaran KGSS sebagai organisasi kelaskaran gerilya. Dalam dektrit yang dikenal dengan nama “ Dekrit Kawilarang “ intinya menyebutkan bahwa “ KGSS dari organisasi gerilya di luar APRIS dianggap telah bubar dan segala usaha untuk melanjutkan dan menghidupkan organisasi tersebut termasuk larangan tentara[[7]](#footnote-8). Mendengar dekrit tersebut Abdul Kahar Muzakkar marah dan memberi reaksi sangat keras dengan mencabut tanda pangkatnya lalu mencampakkan dihadapan panglima TT VII dengan diiringi kata - kata ini tidak ada gunanya[[8]](#footnote-9). Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Kahar Muzakkar tidak setuju dengan sikap Kawilarang untuk membubarkan KGSS. Sejak peristiwa itu Kahar Muzakkar dengan anggota lainya memutuskan untuk masuk ke hutan Sulawesi untuk bergerilya. Andi Sose selaku Panglima KGGS Massenrempulu menculik Abdul Kahar Muzakkar dan dibawa ke Baraka yang merupakan wilayah Enrekang. Baraka merupakan wilayah kewedaan Enrekang. Di Baraka Abdul Kahar Muzakkar, mendapatkan perlindungan dari Andi Sose dikarenakan daerah tersebut merupakn daerah operasinya. Dalam kenyataan sesungguhnya, dia di culik KGSS, atas prakarsa Andi Sose, walaupun mungkin sekali Andi Sose bertindak demikian berdasarkan perintah atau setidak-tidaknya dengan persetujuan Abdul Kahar Muzakkar diam-diam. [[9]](#footnote-10)

Masalah gerilya di Sulawesi Selatan pun kian semakin rumit. Banyaknya perbedaan pendapat antara pemerintah dengan para gerilyawan sehingga tidak memungkinkan untuk menempuh jalan perundingan. Hal itu memaksa Panglima TT VII Koloneal Kawilarang mengeluarkan perintah gerakan dengan tindakan kekerasan untuk menumpas pembangkang CTN[[10]](#footnote-11) yang dianggap sebagai pengacau – pengacau negara pada 17 Agustus 1951.

Setelah mendapat surat dari Kartosuwiryo melalui Bahar Mattalui pada Agustus 1951 Kahar Muzakkar baru menerima tawaran Kartosuwirjo untuk bergabung dengan NII pada tanggal 20 Januari 1952. kemudian Kahar Muzakkar memutuskan untuk bergabung dengan DI/TII dan memproklamasikan Sulawesi Selatan dan daerah sekitarnya menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1953 [[11]](#footnote-12) yang berlokasi di Buntu Susu (Baraka) yang terletak di Kabupaten Enrekang, dan sekaligus menjadi markas DI/TII di Sulawesi Selatan. Abdul Kahar Muzakkar mempunyai sekurang – kurangnya 7.000 orang dibawah pimpinannya dalam KGSS. Brigade ini mempunya lima Batalyon yang berlokasi di Pinrang, Luwu, Enrekang, dan Bonthain.

Batalyon I : Bau Massepe, Parepare, Komandan Andi Selle.

Batalyon II : Batuputih, Palopo, Komandan Andi Tenriajeng.

Batalyon III : Arif Rate, Bonthain, Komandan Asis Taba.

Batalyon IV : Wolter Monginsidi, Enrekang, Komandan Andi Sose.

Batalyon V : 40. 000. Rappang, Komandan Syamsul Bahri. [[12]](#footnote-13)

Penulisan tentang DI/TII tidak bisa terlepas dari Baraka sebagai basis pertahanan pertamanya. Baraka sebagai ibu kota kecamatan di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang merupakan daerah yang sangat cocok dengan stategi perang DI/TII yang bergerilya di hutan. Geografis Baraka yang pada umumnya pegunungan dan sangat sulit untuk dijangkau, itu menjadi pertimbangan pertama alasan Baraka dijadikan sebagai markas DI/TII di Sulawesi Selatan. Selaian dari itu, dengan bantuan pasukan bawahan Abdul Kahar Muzakkar yang menjadi agen politiknya di Baraka, keinginan untuk mendirikan negara Islam akan mudah terwujud[[13]](#footnote-14). Disamping itu faktor keamanan dan dukungan masyarakat yang sebelumnya memang telah mengenal Islam juga menjadi alasan Baraka dijadikan markas DI/TII di Sulawesi Selatan yang berlangsung selama bertahun – tahun.[[14]](#footnote-15)Di tempat kecil inilah anggota DI/TII melakukan berbagai kegiatannya. Merekrut anggota dari masyarakat setempat dengan mengatasnamankan Islam sebagai dasar perjuangan. Masyarakat yang sebelumnya sudah mengenal Islam menyambut dengan antusias akan kedatangan mereka bukan sebagai sebuah politik.

Baraka (Pasui) yang menurut penulis merupakan kampung kecil yang terletak di pelosok Kabupaten Enrekang ternyata memiliki sumbangsi sejarah Indonesia yang sangat kelam selama bertahun – tahun lamanya. Dengan demikian penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang latar belakang pemilihan markas pertama DI/TII yang berlokasi di Pasui Kecamatan Baraka.

1. Gambaran Umum Kecamatan Baraka
	* + 1. Sejarah Singkat

Pada zaman penjajahan Belanda struktur pemerintah berbentuk Onder Afdeling sedang pada masa pendudukan Jepang diatur pula sesuai dengan sistem pemerintahan Jepang yang diberi nama “ Kanrikan yang dikepalai oleh seorang “ Bunken Kanrikan”.Antara tahun 1945-1959 Massenrempulu kembali berbentuk ONDER AFDELING. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, mengatur sampai tingkat dibawah jenjang Kebupaten yang disebut Wilayah Kecamatan. Pada saat tersebut Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang membawahi 5 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Enrekang, Kecamatan Maiwa, Kecamatan Baraka, Kecamatan Anggeraja dan Kecamatan Alla. Kecamatan Baraka pada saat itu telah memiiki 7 desa dan pada tahun 2007 Desa Pasui mengalami pemekaran menjadi Kecamtan Buntu Batu.

* + - 1. Keadaan Geografis

Secara geografis Baraka terletak di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Kecamatan Baraka mempunyai luas 285, 80 Km memiliki 7 Desa yaitu Desa Banti (Tampaan), Desa Pasui (Pasui), Desa Salukanan (Katarin), Desa Botongan (Kalimbua), Desa Parinding (Bau), Desa Eran Batu (Eran Batu) dan Kelurahan Baraka(Baraka) . Daerah ini terletak pada ketinggian 726-950 Meter diatas permukaan laut. Kecamatan Baraka berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kecamatan Curio

Sebelah Timur : Kabupaten Luwu

Sebelah Selatan : Kecamatan Bungin

Sebelah Barat : Kecamatan Malua

Jarak antara Kota Makassar dan Kecamatan Baraka di jalan umum adalah 294.32 Km² atau 163.88 Mil, dan jaraj Kecamatan Baraka dari ibu kota Kabupaten ialah 37 Km². Sebahagian besar wilayahnya adalah pegunungan. Kondisi geografisnya itu menjadikan daerah Baraka sangat potensial dibidang pertanian, perkebunan, peternakan dan pertambangan. Di daerah Baraka umumnya mempunyai topografi berbukit sampai bergunung yang bervariasi dengan lembah dan sungai, sehingga mempunyai medan dan berbukit sampai curam sekali. Pada daerah Kecamatan Baraka pada lapisan tanah bawah terdiri dari bebatuan yang mengandung besi, baru pasir dan lapisan tanah liat keras serta batuan vulkanis. Di sana sini terdapat bagagian-bahagian batu yang menjulang yang mengandung besi dan dimahkotai oleh batu kapur serta peninggalan dari batu karang. [[15]](#footnote-16)

* + - 1. Keadaan Sosial Budaya

Dialek bahasa yang digunakan oleh orang Baraka adalah Bahasa Duri. Bukan hanya Kecamatan Enrekang Bahasa Duri juga digunakan oleh orang Enrekang yang mendiami Kecamatan Anggeraja, Alla, Curio, Buntu Batu, Buntu Tangla dan daerah bagian utara lainnya yang berbatasan dengan Tanah Toraja. Secara dialek penggunaan Bahasa Duri masih ada perbedaan-perbedaan, namun satu dengan yang lain penggunanya masih saling mengerti. Bahasa yang digunakannya oleh orang di luar wilayah itu menyebut dengan Bahasa Duri dan menyebut orannya sebagai orang Duri.

Dalam msyarakat Kabupaten Enrekang termasuk masyarakat Kecamatan Baraka, pada masa kerajaan juga sangat ketat dengan penggunaan strata sosial masyarakat, dengan membedakan kelas bangsawan, rakyat biasa dan budak. Namun, setelah kehadiran Abdul Kahar Muzakkar dengan DI/TII-nya terjadi penghapusan perbedaan strata sosial masyarakat yang menggalakkan persamaan derajat. Bahkan ia menyebut contoh-contoh persamaan derajat dengan menghilangkan istilah Puang, Andi, atau gelar kebangsaan lainnya dan mengganti dengan istilah Bung[[16]](#footnote-17). Strata sosial masyarakat sekarang kelihatannya ditentukan oleh tingkat peran seseorang dalam masyarakat termasuk tingkat ekonominya. Mata pencaharian sebagian besar masyarakat Baraka adalah bertani. Selain itu juga ada yang berkebun dan berternak.

Aspek budaya masyarakat Baraka sebahagian masih menganut sistem kepercayaan yang dikenal secara turun-temurun (kepercayaan animisme, hindu, menyembah berhala dan dinamisme).[[17]](#footnote-18) Meskipun pada tahun 1939 Buntu Batu menjadi pusat Organisasi Keagmaan Muhammadyah di Enrekang, itu tidak berpengaruh lebih terhadap kepercayaan masyarakat Baraka. Barulah kemudian ketika Abdul Kahar Muzakkar datang dengan DI/TII-nya masyarakat mulai meninggalkan kepercayaan aslinya meskipun tidak secara menyeluruh.

1. Baraka Sebelum Kehadiran Pasukan DI/TII

Di daerah Baraka dulunya terkenal dengan adanya Kerajaan besar. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Buntu Batu. Kerajaan ini berjaya sekitar tahun 1900-an. Kepercayaan awal dari masyarakat Buntu Batu pada masa itu masih memegang teguh kepercayaan asli yaitu animisme dan dinamisme. Kepercayaan masyarakat Baraka juga ada yang menyerupai kepercayaan masyarakat Toraja. Mereka menyimpan mayat Raja-raja Buntu Batu dan orang penting lainnya kedalam peti dan disimpan dalam Gua. Barulah ketika kedatangan Kahar Muzakkar di Baraka, mereka membakar peti-peti tersebut dengan tujuan agar masyarakat tidak menyembah selain kepada Allah. Selain itu juga untuk menghindarkan mereka dari perilaku syirik (menduakan Allah).

Paham tentang Dewata yang mempunyai kekuatan bersemayan di tempat-tempat tertentu seperti pohon-pohon besar, gua, batu bsar, kuburan dan lain-lain yang kesehariannya dianggap sebagai tempat yang keramat. Pada tempat-tempat tersebut diletakkan sesajen yang biasa disebut *mangmacani-cani* oleh masyarakat setempat Pada tempat lain seperti di pohon-pohon besar dan gua dilakukan persembahan berupa sesajen yang terdiri atas daun sirih, nasi ketan, daging ayam, ballok dan disertai dengan pembakaran kemenyan.

Selain kepercayaan terhadap Dewa dan pemujaan terhadap arwah nenek moyang, mereka juga percaya adanya setan yang berasal dari manusia. Setan-setan yang biasa mengganggu seperti *Indo Cocoi* (Pengganggu pesta panen), *Puang Mararu* (penyebar penyakit cacar) dan *Kamandang* (penghuni sungai dalam). Selain mahluk halus yang bersemayam dialam, ada juga mahluk halus yang berasal dari manusia. Mahluk halus itu dikenal seperti *Poppo, Parakang, Passulo Tokko*. Mahluk halus ini berasal dari manusia yang mempelajari ilmu-ilmu magic seperti untuk memperoleh kekayaan, kewibawaan, dan keistimewaan lainnya. Ketiga mahluk halus ini berjalan pada malam hari dan igambarkan seperti manusia yang meninggalkan jasadnya dengan lidah yang menjulur keluar.

Dalam bidang pendidikan masyarakat Baraka telah mengenyam pendidikan sejak masa pendudukan Belanda dan Jepang. Namun tidak semua masyarakat dapat merasakannya. Pada masa penjajahan terbentuk Sekolah Rakyat(SR). SR ini hanya diperuntukkan oleh kaum bangsawan. Dalam dunia modern SR ini hampir sama dengan Selokah Dasar (SD). Jenjang waktu yang dihabiskan selama 6 tahun.

1. Baraka Dipilih Sebagai Basis Pertahanan Pertama DI/TII

Setelah mendapat surat dari Kartosuwirjo melalui Bahar Mattaliu pada Agustus 1951 [[18]](#footnote-19), yang berisi tawaran agar gerilyawan Sulawesi Selatan dibentuk Tentara Islam Indonesia dan sebagai komandannya, dan gerakannya sebagai bagian dari Darul Islam, merupakan langkah kedua Abdul Kahar Muzakkar menunjukkan kekecewaannya. Ia kemudian menerima tawaran Kartosuwirjo pada tanggal 20 Januari 1952. Abdul Kahar Muzakkar, kemuduan melakukan persiapan pembentukan negara dengan persiapan sosiologis dan politik. Dua komandan bawahannya berdomisili dan wilayah operasinya di Enrekang. Kedua orang komandan bawahan Abdul Kahar Muzakkar itu bersama pasukannya sekaligus berfungsi sebagai agen politiknya di masyarakat Massenrempulu. Melalui mereka konsep ketatanegaraan yang dicita – cita Abdul Kahar Muzakkar sampai kepada masyarakat. [[19]](#footnote-20)

Markas DI/TII pertama di Sulawesi Selatan berada di Pasui, pada masa itu termasuk salah satu wilayah Swapraja Buntu Batu wilayah Kewedaan Enrekang. Namun, upacara peresmiannya berada di Buntu Susu[[20]](#footnote-21) pada tanggal 7 Agustus 1953. Dipilihnya Massenrempulu Baraka (Pasui) sebagai tempat mengumandangkan Proklamasi NII untuk wilayah Indonesia Timur, dilatarbelakangi oleh faktor – faktor sosial politik masyarakatnya. Faktor – faktor yang dimaksud adalah berkaitan dengan jaminan keamanan dan dukungan masyarakat ditempat pelaksanaan Proklamasi tersebut. Faktor politik, utamanya berkaitan dengan ketegangan gerilyawan dengan tentara. [[21]](#footnote-22) Ada beberapa alasan sehingga Abduh Kahar Muzakkar menjadikan daerah Baraka sebagai basis pertahanan pertama DI/TII di Sulawesi Selatan, diantaranya :

1. Baraka merupakan wilayah operasi Andi Sose

Adanya penolakan atas permintaan Abdul Kahar Muzakkar untuk menjadikan anggota KGSS menjadi APRI oleh Kawilarang, mengakibatkan Kahar Muzakkar menanggalkan semua pangkatnya dan memilih masuk ke hutan. Atas tindakannya semua gerilyawan yang tergabung dalam KGSS menjadi tidak jelas nasibnya. Beberapa hari setelah penanggalan jabatanya, Kahar Muzakkar di culik dan di amankan oleh Andi Sose ke Daerah Baraka, Kabupaten Enrekang. Di Daerah Enrekang khususnya Baraka Abdul Kahar Muzakkar mendapat jaminan keamanan dikarenankan Baraka merupakan daerah operasi dari Andi Sose[[22]](#footnote-23). Sebelum terjadinya perpecahan antara Andi Sose dengan Kahar Muzakkar, Andi Sose merupakan Komandan Batalyon IV Wolter Monginsidi yang berkedudukan di Enrekang. Selain Andi Sose di daerah Enrekang juga terdapar dua pimpinan bawahan Kahar Musakkar yaitu Hamid Ali dan Usman Balo yang memiliki daerah operasi di Latumojong. Kedua pimpinan bawahan Kahar Muzakkar itu bersama dengan pasukannya sekaligus berfungsi sebagai agen politiknya dimasyarakat Massenrempulu. Melalui mereka konsep ketatanegaraan yang dicita-citakan Kahar Muzakkar sampai kepada masyarakat.

Setelah Andi Selle memisahkan diri dari kepemimpinan Kahar Muzakkar tahun 1951, tidak lama kemudian disusul oleh komandan bawahan Kahar Muzakkar di CTN yaitu Andi Sose. Meskipun pada awalnya ialah yang telah memperkenalkan Baraka kepada Kahar Muzakkar yang nantinya menjadi basis pertahanan pertama DI/TII di Sulawesi Selatan. Ketika Gatot Subroto menggantikan Kolonial Kawilarang sebagai Panglima TT VII/Wirabuana, ia melakukan langkah-langkah penyelesaian keamanan di Indonesia Timur, termasuk Sulawesi Selatan. Dalam rangka penyelesaian keamanan itu, kebijaksanaan Panglima TT VII/Wirabua berhasil menarik dan meresmikan Andi Sose dan pasukannya sebagai angggota APRI. Andi Sose diangkat sebagai Komandan Batalyon 720 dengan pangkat Kapten. Dengan demikian Kahar Muzakkar kehilangan lagi satu komandan bawahan yang tidak kecil artinya. Latar belakang kesediaan Andi Sose meninggalkan CTN pimpinan Kahar Muzakkar antara lain karena Andi Sose tidak dapat lagi menerima kepemimpinan Kahar Muzakkar yang dianggap tidak memberikan peluang untuk melakukan kegiatan sesuai dengan yang dikehendakinya. Hal ini terjadi dalam penerimaan kebijaksanaan pemerintah RI yang memberikan peluang bagi anggota CTN untuk menjadi anggota APRI dengan cara peresmian per kelompok kesatuan. Penerimaan itu tidak secara keseluruhan sebagaimana yang dituntut oleh Kahar Muzakkar.

Berpisahnya Andi Sose dari CTN pimpinan Kahar Muzakkar, mendatangkan dua pengaruh. *pertama*, pasukan Kahar Muzakkar menjadi berkurang dalam jumlah yang berarti. Namun itu bukan hal yang serius bagi Kahar Muzakkar, karena mereka mampu merekrut pasukan dari daerah kekuasaan nanti setelah bergabung dengan NII. *Kedua,* dalam dunia politik dikenal istilah “tidak ada kawan yang abadai dan tidak ada lawan yang abadi”. Pepetah itu berlaku bagi Andi Sose. Mereka yang dulunya menjadi kawan seperjuangan mengusir penjajah di tanah Sulawesi tapi sekarang telah menjadi musuh. Kahar Muzakkar bergabung dengan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dan Andi Sose bergabung dengan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI). Namun, dalam hal ini karena kecerdikan Kahar Muzakkar ia dapat melakukan kerja sama dengan mantan komandan bawahannya yaitu Andi Sose. Beliau nantinya yang menjadi suplai persenjataan bagi DI/TII melalui perdagangan. [[23]](#footnote-24)

1. Letak yang strategis

Pada tahun 1961, tuntutan pemekaran Sulawesi Selatan menjadi profinsi di Pulau Sulawesi akhirnya disetujui oleh pemerintah. Posisi letak Propinsi Sulawesi Selatan seperti di tentetukan oleh surat keputusan pemerintah pusat ialah di sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores, di sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar, di sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara, di sebelah Utara berbatasan dengan Sulawesi Tengah. Dengan posisi demikian dapat dimaklumi jika diantara 23 daerah tingkat II yang dimilikinya terdapat 20 daerah yang memiliki daerah pantai dan hanya tiga daerah yang tidak mempunyai daerah pantai yaitu Kabupaten Toraja, Enrekang dan Soppeng[[24]](#footnote-25). Ketiga wilayah ini masing-masing memiliki daerah pegunungan yang luas. Misalnya saja Kabupaten Enrekang yang memiliki luas pegunungan sebesar 85 % dari luas daerahnya[[25]](#footnote-26). Pegunungan inilah yang dijadikan tempat persembunyian bagi gerombolan DI/TII selama bermarkas di Baraka.

Wilayah Baraka memang stategis jika dilihat dari geografisnya. Letak Baraka yang berada cukup jauh dari jalan poros, memungkinkan daerah ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai basis pertahanan. Ditambah lagi ketika anggota Abdul Kahar Muzakkar menghancurkan jembatan penghubung antara Baraka dengan dunia luar maka anggota TNI semakin sulit untuk menjangkau ke pedalaman Enrekang tersebut termasuk Pasui yang menjadi markas DI/TII di Baraka selama bertahun-tahun.

Untuk markas besar KGSS Kahar Muzakkar memilih Baraka, Enrekang karena ditinjau dari segi letaknya yang sangat baik dan memenuhi syarat untuk menjadi sentral kegiatan Kahar Muzakkar dalam penyelesaian masalah gerilyawan. [[26]](#footnote-27)Jika dilihat dari letak geografisnya, di sebelah Utara Baraka berbatasan dengan Kabupaten Tanah Toraja, di sebalah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidrap dan di sebelah Barat Baraka berbatasan dengan Kabupaten Pinrang. Pertimbangan Baraka dijadikan sebagai markas juga karena letak Baraka yang berada dipertengahan. Di derah Baraka Abdul Kahar Muzakkar lebih muda memperluas daerah kekuasaannya ke Kabupaten Luwu, Sidrap, Pinrang dan Toraja.

Setelah pertimbangan letak yang strategis dan mendapatkan jaminan keamanan dari komandan bawahannya, Kahar Muzakkar tidak serta merta langsung memilih Baraka menjadi markasnya, tetapi dengan pertimbangan lain yakni taktik perang. Taktik perang Kahar Muzakkar yaitu bergerilya dalam hutan. Karena Baraka adalah wilayah pegunungan dan memiliki penduduk yang masih sangat sedikit sehingga masih banyak terdapat hutan lebat yang merupakan rumah bagi kaum gerilyawan. Diperkirakan luas hutan lindung Kecamatan Baraka sekitar 23.000 HA. Dengan demikian Kahar Muzakkar telah menetapkan hatinya untuk memilih Baraka sebagai markas sekaligus basis pertahanan pertama DI/TII di Sulawesi Selatan.

1. Pengaruh agama islam

Masyarakat Masenrempulu yang sebenarnya telah menerima pembaharuan sistem sosial dan keagamaan melalui Muhammadiyah melihatnya tidak sebagai konsep politik, tetapi karena konsep dan perintah agama yang dianut dan dipahaminya. Jauh sebelum masuknya DI/TII masyarakat telah memperoleh pengetahuan melalui Organisasi Keagamaan Muhammadiyah, yaitu sejak tahun 1939. Tujuan pembaharuan Muhammadiyah ini adalah untuk pelaksanaan Islam secara murni berlandaskan Al Qur’an dan Al Hadist, tanpa dipengaruhi oleh kebiasaan, adat istiadat dan menghindari Bid’ah, tahyul dan Khurafat. Kepercayaan awal masyarakat Massenrempulu (Baraka) yaitu Animisme dan Dinamisme[[27]](#footnote-28). Kehadiran Abdul Kahar Muzakkar dengan konsep Darul Islam, menyodorkan sistem sosial dan keagamaan yang sama dengan ide Muahammadiyah. Demikian itu langsung disambut oleh kelompok pembeharu yang selama ini fokus untuk memperluas jaringan pembaharuannya. Dengan demikian, tidak ada paksaan bagi masyarakat Baraka untuk ikut menjadi pasukan DI/TII. Justru karena kesadaran sendirilah masyarakat memilih untuk bergabung dengan alasan untuk membela agama Allah yaitu Agama Islam.

Setelah mulai mendapatkan dukungan dari masyarakat Baraka maka pada tanggal 7 Agustus 1953 Abdul Kahar Muzakkar memproklamasikan Sulawesi Selatan dan daerah sekitarnya (meliputi Indonesia bagian Timur termasuk Irian) menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia.[[28]](#footnote-29) Yang berlokasi di Pasui Kabupaten Enrekang.

1. Potensi Baraka Sebagai Markas Pertama DI/TII
2. Kebencian Kahar Muzakkar dan rakyat terhadap TNI

Kekecewaan pribadai Kahar Muzakkar semakin menjadi-jadi dengan kenyataan bahwa pejabat-pejabat penting di Sulawesi Selatan dimonopoli orang Jawa. Termasuk daerah pedalaman massenrepulu ditempatkan Divisi Jawa yang kemudian memicu rasa kedaerahan Kahar Muzakkar, dan sebagian masyarakat Sulawesi Selatan termasuk Massenrempulu. Digambarkan bahwa kebanyakan dari prajurit yang dikirim adalah islam abangan dan menganggap masyarakat setempat sebagai buta huruf, terpencil, primitif, dan tidak tahu Bahasa Indonesia.

Berkaitan dengan tingkat pemahaman Islam Abangan bertemu dengan sebagian masyarakat yang telah menerima pembaharuan Islam melalui Muhammadiyahmengakibatkan munculnya perbedaan-perbedaan pandangan tentang masyarakat yang buta huruf, terpencil dan primitif yang mengakibatkan kekeliruan pandangan prajurit terhadap penduduk yang sebenarnya sangat patuh pada adat istiadat dan keyakinan yang dianutnya. Dalam banyak fakta banyak diantara anak yang tidak diketahui ayahnya orang hanya meyebutnya “bapaknya orang Jawa” dan masyarakat juga penyebut mereka dengan sebutan “Jawa Kallu”[[29]](#footnote-30). Kekecewaan masyarakat terhadap pasukan TNI semakin mengcuat dengan dipicu oleh perilaku TNI yang sangat tidak sesuai dengan adat istiadat masyarakat setempat. Hal tersebut seperti “memperkosa wanita, memukul rakyat tani, membakar rumah dan lumbung padi rakyat serta memasukkan hewan kedalam kebun petanidan bahkan sering malakukan penggeledahan rumah-rumah penduduk dan melakukan penjarahan terhadap harta masyarakat. [[30]](#footnote-31) Tindakan-tindakan TNI seperti itu, menimbulkan kebencian mendalam bagi masyarakat. Kebncian pribadi Kahar Muzakkar dan rakyat, menjadikan wilayah dan rakyat sebagai potensi penempatan basis DI/TII. Di tambah lagi ketika pengangkatan Sanusi Daris menjadi Komandan Batalyon Rante Mario yang dengan sendirinya mengikuti Kahar Muzakkar. Sanusi Daris terus memperluas pengaruhnya dengan berbagai propoganda tentang tujuan untuk menegakkan Negara Islam dengan prinsip persamaan hak, persamaan derajat disamping potensi Sanusi Daris sebagai orang daerah yang menggunakan pendekatan kekeluargaan. Langkah yang ditempuh oleh Sanusi dari untuk memperluas daerah kedudukannya melalui dua cari yaitu secara suka rela dan paksaan terhadap rakyat.

1. Kerjasama dengan komandan bawahan Kahar Muzakkar

Pada tahun 1952 Letnam Kolonel J. F. Warouw yang berkedudukan sebagai Kepala Staf TT VII/Wirabuana berkunjung ke Enrekang untuk bertemu dengan Kahar Muzakkar. Namun, sebelum sampai ke Baraka mereka singgah di Markas Usman Balo yang berlokasi di Karrang. Usman Balo merupakan satu-satunya penunjuk jalan ke markas Kahar Muzakkar di Baraka. Warau tidak bisa lewat jika tidak mendapat izin dari Kahar Muzakkar terlebih dahulu untuk bertemu. Dengan melalui komandan bawahan Kahar Muzakkar Letkol Warouw dan pasukannya diizinkan untuk berkunjung ke markas besar Kahar Muzakkar di Baraka.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ahmadin. 2013. *Metode Penelitian Sosial*. Makassar: Rayhan Intermedia.

Arsip Nasional RI Wilayah Ujung Pandang, Arsip Muhammad Saleh Lahade, 1937-1973, No. Reg. 191

Arsip Nasional RI Wilayah Ujung Pandang, Arsip Statis Pemerintah Daerah Tingkat II Enrekang, 1890-1971, No. Reg. 154

Arsip, Prop. Sul-Sel, 1946-1960, No. 518

Bappeda dan Kantor Statistik. 1991. *Kabupaten Enrekang Dalam Angka 1991.* Makassar: BPS Kabupaten Enrekang.

Dijk, C. Van. 1983. *Darul Islam Sebuah Pemberontakan,* Jakarta : Pustaka Utama Grafiti Press.

Gonggong, Anhar. 2004. *Abdul Kahar Muzakkar Dari Patriot Hingga Pemberontak*, Yogyakarta: Ombak.

Hafied, M. Yunus. 1991/1992. *Masssenrempulu Menurut Catatan D. F. Van Braam Morris diterjemahkan oleh H. A. M. Mappasanda*. 1991. Ujung Pandang : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.

Harvey, Barbara Sillars. 1989. *Pemberontakan Kahar Muzakkar Dari Tradisi ke DI/TII,* Jakarta : Pustaka Utama Grafiti Press.

Omes dangke.

<https://wa-iki.blogspot.com/2010/12/wisata-alam-buntu-batu-potensial.html>.

Bappeda Dan Kantor Statistik. 1991. *Kabupaten Enrekang Dalam Angka 1991*, Enrekang: BPS Kabupaten Enrekang.

Mattalioe, Bahar. 1994. *Pemberontakan Meniti Jalur Kanan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Nawir. 2000. *Sejarah dan Budaya Massenrempulu*, Makassar : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.

Sitonda, Muhammad Natsir. 2014. *Integrasi Gerilya Darul Islam/Tentara Islam Indonesia ke Negara Kesatuan Republik Indonesai*. Makassar: Yayasan Pendidikan Mohammad Natsir.

Sitonda, Muhammad Natsir. 2014.*Sejarah Massenrempulu jilid 1*. Makassar: Yayasan Pendidikan Mohammad Natsir.

Sjamsuddin, Helius. 2012. *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak

Poelinggomang, Edward L & Mappangara Suriadi. 2005*. Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2.* Makassar : bilitbangga dan MSI.

Tangke, A Wanua & Nasyaruddin, Anwar. 2006. *Kisah Tertembaknya Kahar Muzakkar*. Pustaka Refleksi.

1. Ruslan dkk, *Mengapa Mereka Memberontak? Dedengkot Negara Islam Indonesia*, Yogyakarta : Bio Pustaka, 2008, Hlm. 22 [↑](#footnote-ref-2)
2. Anhar Gonggong, *Abdul Kahar Muzakkar Dari Patriot Hingga Pemberontak,* Yogyakarta: Ombak, 2014, Hlm. 1 [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid*. Hlm. 1 [↑](#footnote-ref-4)
4. [↑](#footnote-ref-5)
5. Edward L Poelinggomang dan Mappangara Suriadi. 2005*. Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2.* Makassar :Balitbangga dan MSI. Hlm. 309. [↑](#footnote-ref-6)
6. Anhar Gonggong, *Abdul Kahar Muzakkar Dari Patriot Hingga Pemberontak,* Yogyakarta: Ombak, 2014, Hlm. 280 [↑](#footnote-ref-7)
7. Anhar Gonggong, *Abdul Kahar Muzakkar Dari Patriot Hingga Pemberontak,* Yogyakarta: Ombak, 2004, Hlm. 23 [↑](#footnote-ref-8)
8. Barbara Sillars Harvey. 1989. *Pemberontakan Kahar Muzakkar Dari Tradisi ke DI/TII,* Jakarta : Pustaka Utama Grafiti Press. Hlm. 141 [↑](#footnote-ref-9)
9. C. Van Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1983, Hlm. 157 [↑](#footnote-ref-10)
10. [↑](#footnote-ref-11)
11. Arsip Nasional RI Ujung Pandang, Arsip Muhammad Saleh Lahade, 1937-1973, No. Reg. 191 [↑](#footnote-ref-12)
12. Anhar. *Op. Cit* Hlm. 138 [↑](#footnote-ref-13)
13. Muhammad Natsir Sitonda. 2014. *Integrasi Gerilya DI/TII ke NKRI*. Makassar: Yayasan Pendidikan Mohammad Natsir. Hlm. [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid* . Hal. 112 [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid*. Hlm. 15 [↑](#footnote-ref-16)
16. Muhammad Natsir Sitonda. 2014. *Integrasi Gerilya DI/TII ke NKRI*. Makassar: Yayasan Pendidikan Mohammad Natsir .Hlm. 56 [↑](#footnote-ref-17)
17. Wawancara dengan Ambe Aba’ tanggal 17 April pukul 19. 07 di Pasui Kecamatan Buntu Batu. [↑](#footnote-ref-18)
18. Bahar Mattalioe. 1994. *Pemberontakan Meniti Jalur Kanan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. [↑](#footnote-ref-19)
19. *Op. Cit*, Hal. 67 [↑](#footnote-ref-20)
20. Wawancara dengan Pak Nasrul. Tanggal 13 Oktober 2017. Pukul 12.21 di Rumbo, Keluraahan Tomenawa. [↑](#footnote-ref-21)
21. Muhammad Natsir Sitonda, *Integrasi Gerilya DI/TII ke NKRI*, Makassar: Yayasan Pendidikan Muhammad Natsir, 2012, Hal. 67 [↑](#footnote-ref-22)
22. Kahar Muzakkar*, Konsepsi Negara Demokrasi*, Bandung: Sega Asri, 2013, Hlm. 23 [↑](#footnote-ref-23)
23. Wawancara dengan Ambe’ Sengka’ tanggal 11 Mei 2018 pukul 20.15 di Pasui [↑](#footnote-ref-24)
24. Anhar Gonggong, *Abdul Kahar Muzakkar Dari Patriot Hingga Pemberontak,* Yogyakarta: Ombak, 2004, Hlm. 25 [↑](#footnote-ref-25)
25. Mohammad Natsir Sitonda, *Sejarah Massenrempulu Jilid 2*, Makassar: Tim Yayasan Pendidikan Mohammad Natsir, 2012. [↑](#footnote-ref-26)
26. Bahar Mattalioe,. 1994. *Pemberontakan Meniti Jalur Kanan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Hlm. 180 [↑](#footnote-ref-27)
27. Muhammad Natsir Sitonda, *Sejarah Massenrempulu jilid 1 ,* Makassar: Tim Yayasan Pendidikan Mohammad Natsir. 2012 [↑](#footnote-ref-28)
28. Arsip Nasional RI Wilayah Ujung Pandang, Arsip Muhammad Saleh Lahade, 1937-1973, No. Reg. 191 [↑](#footnote-ref-29)
29. Wawancara dengan Indo’ Eni tanggal 29 April 2018 pukul 20. 15 di Pasui, Kecamatan Buntu Batu. [↑](#footnote-ref-30)
30. Arsip, Prop. Sul-Sel, 1946-1960, No. 518 [↑](#footnote-ref-31)